

LITERATURE REVIEW: PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KECURANGAN (FRAUD) PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

**Ahmad Zharif Habibullah¹, Joprianta Tarigan², Ilham Ibadurrahman³, Melisa Sari Kano⁴,
Mohammad Djasuli⁵**

Universitas Trunojoyo Madura

e-mail: ahmadzharif133@gmail.com¹, Joprianta20gmail.com², ilhamibadd@gmail.com³,
kanomelisasari@gmail.com⁴, djasuli@trunojoyo.ac.id⁵

Abstrak – Penelitian ini menguji pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah yang berpengaruh pada tingkat kecurangan atau manipulasi pada laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian internal pemerintah dibagi menjadi lima elemen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, tindakan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Kecurangan pelaporan keuangan suatu salah saji yang diakibatkan oleh kecurangan dalam pelaporan keuangan, termasuk penyajian yang salah atau penghilangan jumlah yang disengaja dalam laporan keuangan untuk memanipulasi pengguna laporan keuangan, sehingga berdampak terhadap aset. Pada Penelitian kali ini memakai metode literatur review dengan pendekatan deskriptif kualitatif, Yaitu dengan mengumpulkan data-data atau informasi sekunder, mengenai dampak dari pengendalian internal yang berpengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dengan melakukan review pada jurnal-jurnal yang berkaitan pengaruh pengendalian internal terhadap kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah. Dan penelitian ini menghasilkan bahwa lingkungan, penilaian resiko, tindakan pengendalian, informasi dan komunikasi serta yang terakhir pemantauan memiliki pengaruh negatif yang signifikan kepada tindakan kecurangan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh sebab itu semakin rendah atau kecil kemungkinan suatu kecurangan maka semakin baik sistem pengendalian internal pemerintah daerah yang meliputi lima elemen tersebut.

Kata Kunci: Pengendalian Internal, Kecurangan, Laporan Keuangan, Pemerintah Daerah.

Abstract– This research examines the influence of the government's internal control system which influences the level of fraud or manipulation in local government financial reports. The government's internal control system is divided into five elements, namely control environment, risk assessment, control measures, information and communication, and monitoring. Fraudulent financial reporting is a misstatement resulting from fraud in financial reporting, including the intentional misrepresentation or omission of amounts in financial reports to manipulate users of financial statements, thereby impacting assets. In this research, we used a literature review method with a qualitative descriptive approach, namely by collecting secondary data or information regarding the impact of internal control on regional government financial reports by conducting a review of journals related to the influence of internal control on fraudulent reporting. Local government finances. And this research shows that the environment, risk assessment, control measures, information and communication and finally monitoring have a significant negative influence on acts of fraud in local government financial reports. Therefore, the lower or smaller the possibility of fraud, the better the local government's internal control system which includes these five elements.

Keywords: Internal Control System, Fraud, Financial Report, Local Government.

PENDAHULUAN

Peran dan tanggung jawab besar di pemerintah daerah mengelola keuangan publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan transaksi penukaran mata uang dilakukan secara aman dan transparan. Salah satu tindakan potensial yang dapat diambil adalah dengan menerapkan pengendalian internal yang efektif. Sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (UU nomor 60 tahun 2008). Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dijalankan untuk memberikan keyakinan memadai dan efektif mengenai pencapaian tujuan organisasi. Pentingnya tentang kinerja pemerintah daerah serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dan harus diperhatikan antara lain aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara (UU nomor 23 tahun, 2014).

Di pemerintahan, audit internal adalah proses yang dirancang untuk memberikan informasi tentang kinerja pemerintah, seperti efisiensi dan efektivitas operasional, pengawasan keuangan, dan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku (UU Nomor 60 Tahun 2008). Pemantauan internal yang efektif dapat mengidentifikasi dan mendeteksi adanya penyimpangan dalam transaksi mata uang. Semakin sukses proses internal yang dilakukan maka semakin kecil kemungkinan terjadinya fluktuasi nilai tukar mata uang (Syafira & Chairi, 2023). Pengendalian internal yang efektif dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan dalam pertukaran mata uang negara. Manajemen internal yang efektif dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang positif, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (Humam et al., 2020).

Sistem pengendalian internal negara atau disingkat (SPIP), menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 (SPIP) merupakan suatu sistem pengendalian internal yang dilaksanakan secara menyeluruh dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan daerah. Sistem pengendalian internal pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan pengendalian melalui unit pengendalian internal negara. Sistem pengendalian eksternal pemerintah dilaksanakan oleh Komisi Pengawasan (BPK), DPR/DPRD, kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan lembaga hukum lainnya. Sistem Pengendalian Internal Negara (SPIP) terdiri dari beberapa unsur, Lingkungan pengendalian adalah elemen pertama dalam Sistem Pengendalian Internal Negara (SPIP). Manajer instansi pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang mendukung perilaku positif dan mendorong penerapan SPI di lingkungan kerja mereka. Ini melibatkan berbagai kegiatan, termasuk memprioritaskan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap peningkatan keahlian, serta memberdayakan kepemimpinan yang efektif. Selain itu, penting juga untuk membangun struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab secara tepat, merumuskan serta melaksanakan kebijakan pengembangan sumber daya manusia yang efektif, memahami peran pejabat pengendalian internal pemerintah dengan baik, dan menjaga hubungan kerja yang harmonis dengan instansi pemerintah terkait. Semua ini merupakan elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pengendalian internal yang efektif. Penilaian risiko merupakan elemen

kedua dalam Sistem Pengendalian Internal Negara (SPIP), yang dimulai dengan penetapan tujuan yang jelas dan konsisten bagi lembaga pemerintah, baik secara institusional maupun operasional. Lembaga pemerintah juga efektif dalam mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan, baik yang berasal dari dalam maupun luar organisasi. Risiko-risiko yang teridentifikasi dianalisis, dan dampaknya terhadap pencapaian tujuan ditentukan. Manajer instansi pemerintah bertanggung jawab untuk merumuskan metode manajemen risiko serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk meminimalkan risiko tersebut. Elemen ketiga dari pengendalian internal adalah aktivitas pengendalian, yang meliputi kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan untuk mencegah, mendeteksi, serta memperbaiki penyimpangan dari tujuan organisasi. Unsur pengendalian internal yang keempat adalah informasi dan komunikasi yang penting untuk mendukung SPIP yang efektif. Unsur pengendalian internal yang kelima adalah Pengawasan Pengendalian Internal yang merupakan proses berkesinambungan untuk mengevaluasi efektivitas SPIP.

Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah harus terbebas dari kecurangan atau yang dikenal dengan istilah fraud, sehingga penting bagi instansi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa tidak adanya unsur salah saji material dalam melakukan penyusunan laporan keuangan. Fraud merupakan tindakan ilegal yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau melanggar hukum serta merugikan dan merusak reputasi perusahaan (Sari et al., 2022). Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sangat diperlukan bagi publik untuk mengetahui akuntabilitas terhadap pemerintah daerah. Kenyataan di lapangan, kualitas informasi dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara umum masih buruk atau lemah yaitu 91% LKPD buruk padahal pemerintah telah melakukan reformasi manajemen keuangan negara/daerah agar menghasilkan informasi laporan keuangan berkualitas sesuai dengan kriteria kualitas laporan keuangan menurut PP. No. 71 Tahun 2010. Menurut Peraturan Presiden Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui sumber sekunder seperti pencarian dan rekonstruksi informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan penelitian-penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik penelitian ini. Dalam menganalisis data kami peroleh dilakukan dengan teknik tinjauan pustaka, yaitu mencari persamaan, perbedaan, memberikan wawasan, membandingkan, dan merangkum dari berbagai jurnal terdahulu yang relevan dengan topik judul penelitian. Oleh karena itu, dalam analisis yang dilakukan dibagi menjadi tiga tahap yaitu analisis data, pengolahan data, dan penegasan kembali kesimpulan. Dapat dikatakan sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif, Analisis deskriptif merupakan proses penguraian data yang didapat secara teratur, diikuti dengan pemberian makna dan penjelasan yang jelas sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Penelitian ini didasarkan pada artikel-artikel dalam bahasa Indonesia yang diterbitkan dalam rentang waktu lima tahun terakhir, yaitu 2019 hingga 2024, baik menggunakan metode penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Dalam analisis deskriptif, data dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk kemudian

diinterpretasikan secara mendalam, membantu pembaca untuk memahami informasi dengan lebih baik.

Tabel 1 Daftar artikel yang digunakan dalam literature review

NO	Penulis	Judul	Hasil
1.	Fitri Jumi Rahayu, Tri Jatmiko Wahyu Prabowo, (Rahayu & Prabowo, 2018)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Lingkungan, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
2.	Agustina Indriani, (Gustina, 2021)	Peran Pencegahan (Fraud) Memoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) dan Pengawasan Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh secara positif terhadap pencegahan (fraud), sementara pengawasan internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan (fraud), Sementara itu, pencegahan (fraud) memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
3.	Ayem, S., & Kusumasari, K. F. (Ayem & Kusumasari, 2020)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Pencegahan (Fraud) dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Mediasi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas, sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tidak berpengaruh terhadap (Fraud), dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tidak berpengaruh terhadap (Fraud) dengan Akuntabilitas sebagai mediasi. Variabel.
4.	Wildayanti SD, Rio Monoarfa, Usman, (Sd & Monoarfa, 2023)	Pengaruh Pengendalian Internal Dan Transparansi Terhadap Pencegahan Kecurangan Pada Laporan Keuangan	Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pengendalian Internal berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pencegahan Fraud dalam Laporan Keuangan. Selain itu, Transparansi juga mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap Pencegahan (Fraud) dalam Laporan Keuangan. Terakhir, Pengendalian Internal dan Transparansi mempunyai dampak besar terhadap Pencegahan Penipuan dalam Laporan Keuangan. Transparansi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan pada Laporan
5.	Inta Budi Setya Nusa, (Budi & Nusa, 2022)	Pengaruh Pengendalian Internal & E-Procurement Terhadap (Fraud): (Studi kasus pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Inspektorat Kabupaten Bandung Barat)	Penelitian ini menemukan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap (fraud). Ini mengindikasikan bahwa meskipun pengendalian internal yang baik dapat membantu mengurangi (fraud), masih ada banyak faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya (fraud). Beberapa faktor tersebut antara lain adalah kurangnya sumber daya aparatur yang memahami sistem penganggaran berbasis kinerja, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

			undangan. Selain itu, kurangnya pengetahuan dan pemahaman aparaturnya tentang (fraud) juga menjadi faktor yang berperan. Terakhir, kurangnya budaya anti-(fraud) di instansi juga turut berkontribusi terhadap potensi terjadinya (fraud).
--	--	--	--

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengendalian internal adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh manajemen untuk memberikan kepercayaan yang memadai dalam tercapainya tujuan organisasi, seperti efisiensi dan keefektifitas dalam operasional, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang ada. Sehingga keefektifitas dalam pengendalian internal dapat berfungsi untuk mencegah, menemukan, dan mengoreksi kesalahan atau kecurangan dalam pengelolaan keuangan dan laporan keuangan pemerintahan.

Pengendalian internal yang efektif dapat mencegah dan mendeteksi adanya kecurangan didalam pelaporan keuangan. Semakin baik pengendalian internal yang diterapkan maka semakin kecil kemungkinan terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan (sinaga, 2022). Oleh sebab itu, komponen penting dalam pencegahan (fraud) atau kecurangan di lingkungan pemerintahan daerah adalah pengendalian internal. Pemerintah daerah perlu terus meningkatkan dan mengevaluasi efektivitas pengendalian internal yang diterapkan, serta melakukan perbaikan yang diperlukan untuk menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah dan mencegah terjadinya kecurangan.

Berdasarkan beberapa artikel yang telah dikaji, terdapat beberapa pengaruh pengendalian internal terhadap (fraud) atau kecurangan:

- Pengaruh positif:

Beberapa penelitian menyebutkan dampak pengendalian internal memiliki efek positif terhadap pencegahan (fraud) atau kecurangan, yang berarti bahwa memiliki pengendalian internal yang baik dapat membantu mengurangi kemungkinan (fraud) atau kecurangan yang terjadi.

1. Pengendalian internal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap fraud (budi & nusa, 2022).

Meskipun pengendalian internal berpengaruh positif dalam mencegah fraud, namun pengaruhnya tidak signifikan. Ini menunjukkan bahwa pengendalian internal bukanlah satu-satunya faktor penentu dalam mencegah kecurangan, melainkan harus dipadukan dengan upaya-upaya lain seperti peningkatan integritas dan etika, pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang tegas.

2. Pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud. (rahayu & prabowo, 2018) (sd & monoarfa, 2023)

Dapat diartikan bahwa pengendalian internal memiliki peran penting dan berkontribusi secara nyata dalam upaya mencegah terjadinya tindak kecurangan (fraud) dalam instansi.

- Pengaruh tidak signifikan:

Pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap fraud dengan akuntabilitas sebagai variabel mediasi (ayem & kusumasari, 2020). Namun, terdapat juga penelitian yang menunjukkan bahwa pengaruh pengendalian internal terhadap fraud tidak signifikan. dan terdapat beberapa faktor yaitu:

- a. Kurangnya pegawai yang memahami sistem penganggaran berbasis kinerja, standar akuntansi pemerintahan (sap), dan ketaatan terhadap regulasi menjadi tantangan yang dihadapi.

Kurangnya sumber daya aparatur yang kompeten dalam hal-hal tersebut karena beberapa faktor, seperti kurangnya pelatihan dan pendidikan, minimnya pengalaman, atau bahkan rendahnya integritas dan etika dari aparatur itu sendiri. Sehingga, untuk meminimalisir terjadinya kecurangan pada laporan keuangan pemerintah, pada sistem penganggaran berbasis kinerja, sap, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku masih ada kurangnya pegawai yang memahami sistem penganggaran berbasis kinerja, standar akuntansi pemerintahan (sap), dan ketaatan terhadap regulasi menjadi tantangan yang dihadapi.. Hal ini dilakukan melalui program pelatihan, pendidikan, dan sertifikasi yang berkelanjutan, serta penerapan sistem reward and punishment yang baik untuk meningkatkan integritas dan etika aparatur.

- b. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman aparatur tentang (fraud)

Penting bagi aparatur pemerintah untuk mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang fraud, mulai dari definisi, jenis-jenis, modus operandi, dampak, hingga cara pencegahan, pendeteksian, dan investigasi. Hal ini dapat dicapai melalui program pelatihan dan sosialisasi yang berkelanjutan, serta penyediaan sumber daya informasi atau pedoman tentang fraud bagi aparatur. Dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman aparatur tentang fraud, diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan dan kepekaan mereka terhadap tindakan-tindakan kecurangan, serta membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pengelolaan keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel.

- c. Kurangnya budaya anti-fraud di instansi

Untuk membangun budaya anti-fraud yang kuat di instansi pemerintah, diperlukan komitmen yang kuat dari pimpinan, program pelatihan dan sosialisasi yang berkelanjutan, penegakan hukum dan pemberian sanksi yang tegas, serta tidak ada toleransi terhadap pelanggaran atau kecurangan dalam skala apapun. Budaya anti-fraud yang kuat dapat membantu mencegah dan mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan pemerintah secara lebih efektif.

- Faktor-Faktor yang Dapat Meminimalisir terjadinya Fraud:

- 1) Peran pencegahan fraud. (Indriani, 2021)

Upaya pencegahan fraud dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penyusunan kebijakan dan prosedur anti-fraud, penerapan sistem pengendalian internal yang memadai, pelatihan dan sosialisasi kepada pegawai, serta pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan. Pencegahan fraud harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh pihak dalam organisasi, mulai dari pimpinan hingga staf pelaksana.

- 2) Akuntabilitas. (Ayem & Kusumasari, 2020)

Dengan menerapkan prinsip akuntabilitas secara konsisten, pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. Selain itu, akuntabilitas juga dapat mencegah terjadinya fraud pada laporan keuangan pemerintah, karena setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka untuk diawasi oleh publik maupun lembaga pengawas. Oleh karena itu, akuntabilitas merupakan faktor penting dalam upaya pencegahan fraud dan menjaga integritas laporan keuangan pemerintah. Pemerintah harus terus berupaya untuk meningkatkan akuntabilitas dalam setiap aspek pengelolaan keuangan negara.

3) Transparansi. (Sd & Monoarfa, 2023)

Transparansi merupakan faktor penting dalam upaya pencegahan fraud pada laporan keuangan pemerintah. Pemerintah harus terus meningkatkan transparansi dengan menyediakan akses informasi yang terbuka, akurat, dan tepat waktu kepada masyarakat luas. Hal ini akan membantu menjaga integritas pengelolaan keuangan negara dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap kecurangan (Fraud) pada laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu diperlukan implementasi pengendalian internal yang efektif dalam administrasi pemerintahan. Hal ini dapat mengurangi risiko kecurangan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah secara negatif, sementara secara positif meningkatkan upaya pencegahan kecurangan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Namun jika pengendalian internal dalam pemerintahan itu kurang efektif dan tidak berjalan dengan baik atau kurang adanya pengontrolan, maka dapat mengakibatkan tingkat kecurangan pada laporan keuangan pemerintah daerah mudah terjadi.

Mungkin dapat diberikan rekomendasi berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan di atas adalah dimanapemerintah daerah dapat meningkatkan pengontrolan yang baik, ketat, dan secara teratur terhadap internal yang ada dalam pemerintah daerah dan selalu menerapkan standar yang tinggi untuk pengendalian internal yang baik dan juga dengan meminimalisir kecurangan dengan meningkatkan kompetensi pegawai daerah pada laporan keuangan pemerintah daerah yang terjadi di lembaga ke pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayem, S., & Kusumasari, K. F. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 160. <https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.25827>
- Budi, I., & Nusa, S. (2022). Pengaruh pengendalian internal & e-procurement terhadap fraud. 4(7), 2744–2753.
- COSO. (2012). *Internal Control—Integrated Framework*.
- Gustina, I. R. A. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Penerapan. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 10(1), 56–64.
- Humam, H., Ardini, L., & Kurnia, K. (2020). Efektifitas Sistem Pengendalian Intern dalam Mencegah Kecurangan di Perusahaan Daerah. *Equity*, 23(2), 151–166. <https://doi.org/10.34209/equ.v23i2.2084>
- Indriani, A. (2021). Pemerintahan (SPIP) dan Pengawasan Internal Terhadap. *Financial and Tax*, 1(2), 70–85.
- Omposunggu, S. G., Salomo, R. V., & Indonesia, U. (2019). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 5(1), 78–86.
- Rahayu, F. J., & Prabowo, T. J. W. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 7(1), 1–14. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Rasyid. (2014). No Title. *Pontificia Universidad Catolica Del Peru*, 8(33), 44.
- Sari, M. P., Mahardika, E., Suryandari, D., & Raharja, S. (2022). The audit committee as moderating the effect of hexagon's fraud on fraudulent financial statements in mining

- companies listed on the Indonesia stock exchange. *Cogent Business and Management*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2150118>
- Sd, W., & Monoarfa, R. (2023). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Transparansi Terhadap Pencegahan Kecurangan Pada Laporan Keuangan. 8(2), 115–122.
- Sinaga, E. P. (2022). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Keadilan Organisasi, Kompetensi Aparatur, dan Moralitas Aparat Terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(1), 103–112. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1208>
- Soepriadi, D. N., & Leiwakabessy, T. F. (2023). Efek Moderasi Moralitas Individu terhadap Hubungan Pengendalian Internal dan Kecendrungan Kecurangan. *Goodwood Akuntansi Dan Auditing Reviu*, 1(2), 165–175. <https://doi.org/10.35912/gaar.v1i2.2168>
- Syafira, H., & Chairi, A. (2023). Pengaruh Pengendalian Internal , Whistleblowing , Dan Ethical Leadership Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Empiris Pada Kantor Perwakilan Bpkp Jawa Tengah). *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(3), 1–13.
- UU_2008_11. (2008). No Title p . Phys. Rev. E. <http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/7130/1/LUZARDO-BUIATRIA-2017.pdf>
- Yuwannita, A., & Ariani, N. E. (2016). Analisis Hubungan Pengendalian Internal Versi COSO Terhadap Indikasi Kecurangan Laporan Keuangan Pada Baitul Qiradh Anggota Pusat Koperasi Syariah Nanggroe Aceh Darussalam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(1), 199–209..